

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Studi ini berangkat dari argumen bahwa *gig economy*, melalui *platform* YouTube mereproduksi ketimpangan di desa. Alih-alih menjadi ruang kerja yang fleksibel, menciptakan pekerja yang independen, dan mendemokratisasi peluang ekonomi sebagaimana klaimnya, kasus di Kasegeran justru menunjukkan bahwa YouTube melalui algoritmanya menciptakan kerentanan yang berujung melanjutkan ketimpangan di internal *youtuber* lewat praktik eksploitatif dan relasi kuasa yang timpang. Tesis ini menunjukkan bagaimana ketimpangan baru di Kasegeran direproduksi oleh relasi kuasa yang timpang dalam tiga dimensi: (1) *youtuber* dengan YouTube; (2) *youtuber* dengan negara, dan (3) antar kreator.

Pada dimensi pertama, relasi antara *youtuber* dan YouTube memperlihatkan praktik subordinasi. *Youtuber* menjadi pekerja dengan sistem kerja yang fleksibel namun kehilangan wewenangnya dalam monetisasi dan pengelolaan konten karena praktik alienasi. Fleksibilitas kerja yang semula dianggap keuntungan, dalam praktiknya justru membebani *youtuber* dengan pengalihan terhadap seluruh beban dari YouTube tanpa adanya jaminan perlindungan dan dukungan dalam bentuk apapun dari YouTube. Mekanisme *profit sharing* yang lebih besar untuk *youtuber* menjadi tidak berarti dengan seluruh tanggungan beban yang dipikul sendiri oleh *youtuber*. Kerja individual tanpa berbasis algoritma yang transparan akhirnya menjadikan mereka sebagai bagian dari kelompok prekariat.

Kedua, relasi antara negara dengan *youtuber* memperlihatkan adanya kekosongan regulasi ketenagakerjaan serta sistem perpajakan yang tak kompatibel. Negara tidak hadir sebagai pelindung dan pendukung, tetapi justru menjadi bagian dari entitas yang mengambil keuntungan lewat sistem pajak yang tidak adaptif terhadap pekerja YouTube. Di Kasegeran, minimnya sosialisasi dan edukasi serta inkompetensi sistem perpajakan dalam memahami perhitungan komisi dari *youtuber* pada akhirnya melahirkan resistensi kolektif mereka terhadap negara. Jika semula *youtuber* hanya berhadapan dengan YouTube, saat ini mereka juga harus

menghindar dari petugas pajak. Di sisi lain, akselerasi perkembangan infrastruktur digital yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu menjawab sepenuhnya kebutuhan perlindungan para pekerja informal digital berbasis gig karena kosongnya regulasi yang mengatur keberadaan mereka.

Ketiga, argumen yang membuktikan bahwa YouTube menciptakan ketimpangan di internal *youtuber* diperkuat karena adanya perbedaan tingkat *rating*, reputasi, dan visibilitas pada *channel* mereka masing-masing. Hal ini muncul sebagai akibat dari persaingan pada YouTube yang berbasis *crowdwork*. Pada dasarnya, bentuk persaingan yang dialami oleh para *youtuber* adalah untuk memperebutkan *viewers*. Kenyataan yang muncul dari Kasegeran menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap *skill*, kompetensi, dan *media literacy* membuat mereka menjadi tak kompetitif, tidak bisa mengikuti tren algoritma, hingga membuat mereka kehilangan *viewers* dan pendapatan. Sedangkan *youtuber* yang bisa meningkatkan akses terhadap 3 unsur tersebut, tetap mampu mempertahankan eksistensinya.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa kerentanan dalam model ekonomi gig di desa lahir dari hasil konfigurasi struktural yang kompleks antar 3 dimensi di atas. Melalui kerangka analisis ekonomi-politik, tesis ini mengonfirmasi bahwa YouTube mereproduksi ketimpangan dari para *youtuber* di Kasegeran melalui *stance*-nya yang tidak netral, melainkan menanamkan struktur pasar yang berlandaskan logika relasi-kuasa yang timpang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa YouTube bukan sekadar penyedia layanan, tetapi juga aktor ekonomi-politik yang memiliki kepentingan komersial. Pola kerja yang dijalankan oleh YouTube semakin menjelaskan bahwa praktik kerja gig dalam *platform* tidak terikat pada norma sosial, nilai moral, dan regulasi negara sebagai penopang institusi negara, melainkan tunduk sepenuhnya terhadap logika pasar berbasis *profit*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Polanyi pada gagasan *disembeddedness*.

## 5.2 Implikasi

Temuan dari studi ini memberi sejumlah implikasi penting terhadap ranah teoritis maupun kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini menentang narasi ekonomi

gig sebagai bentuk baru sistem kerja yang inklusif. *Youtuber* di Kasegeran menjadi bukti bahwa model ekonomi gig berbasis YouTube tidak menghapus ketimpangan yang telah ada sebelumnya, melainkan justru mereproduksi dalam bentuk baru, yakni ketimpangan berbasis algoritma. Ketimpangan ini juga menggeser konfigurasi sosial di pedesaan yang semula berbasis agraria, trah, dan jabatan, menjadi *rating*, reputasi dan visibilitas *platform*.

Studi ini memperkaya literatur dan temuan terdahulu mengenai logika kerja *platform* yang bersandar pada fleksibilitas semu dengan penyerahan beban produksi kepada individu pekerja. Dalam konteks di Kasegeran, hal ini terefleksi dalam beban inovasi konten yang terus disyaratkan oleh algoritma untuk memperoleh *rating*, reputasi, dan visibilitas. YouTube memelihara kompetisi tanpa adanya sistem yang jelas, yang berujung pada kejatuhan sebagian pekerja. Temuan pada studi ini memunculkan suatu indikasi awal terhadap potensi perubahan yang dapat muncul pada desa yang terkena dampak atas ekonomi gig.

Dalam tataran institusional, studi ini membuktikan perlunya regulasi yang jelas untuk mengatur keberadaan pekerja digital dengan mengakomodir hak-hak dasarnya. Studi ini menunjukkan bahwa negara justru muncul dengan skema pajak yang tidak kompatibel tanpa edukasi dan sosialisasi yang memadai. Negara perlu mengembangkan kebijakan yang berbasis pemahaman terhadap dinamika kerja di *platform* digital.